

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan tahunan merupakan sumber informasi bagi investor sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal dan sebagai media utama penyampaian informasi oleh manajemen kepada investor dan pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan tahunan memberikan informasi kondisi keuangan dan yang lainnya kepada pemegang saham, kreditur dan *stakeholders* atau calon *stakeholders* agar pengguna laporan tahunan tidak salah menginterpretasi dalam membaca informasi di dalamnya untuk pengambilan keputusan, maka perusahaan wajib melakukan pengungkapan dengan sebaik-baiknya dan selengkap mungkin (Maharani dan Budiasih, 2016).

Pencapaian efisiensi dan sebagai sarana akuntabilitas publik, pengungkapan laporan keuangan menjadi faktor yang signifikan. Pengungkapan laporan keuangan menjadi faktor yang signifikan. Pengungkapan laporan keuangan dapat diungkapkan dalam bentuk penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang ditempuh, kontijensi atau ketidakpastian, metode persediaan, jumlah saham yang beredar dan ukuran alternatif, misalkan pos-pos yang dicatat berdasar *historical cost* (Na'im dan Rakhman, 2000). Peraturan mengenai pos-pos laporan keuangan minimum yang harus diungkap dalam laporan keuangan, diatur secara rinci di dalam Surat Keputusan Bapepam, sedangkan peraturan pos-pos laporan keuangan tersebut, dapat diamati melalui variabel-variabel tertentu yang tidak berpengaruh

terhadap *disclosure* agar digunakan sebagai acuan untuk pertimbangan pengambilan keputusan bagi sebuah perusahaan baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Kualitas informasi keuangan terdapat dua jenis pengungkapan (*disclosure*) yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengungkapan tersebut adalah pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan yang diwajibkan peraturan pemerintah dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan peraturan. Penelitian tentang pencapaian efisiensi dan sebagai sarana akuntabilitas publik, pengungkapan laporan keuangan menjadi faktor yang signifikan (Na'im dan Rakhman, 2000). Pengungkapan laporan keuangan yang memadai dapat ditempuh melalui penerapan informasi yang baik. Untuk menyelenggarakan informasi yang baik bagi pelaku pasar modal, maka pemerintah menunjuk Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Peraturan mengenai pos-pos laporan keuangan diatur secara rinci di dalam SK Bapepom

Menurut Hendriksen (2002) ada tiga konsep mengenai pengungkapan laporan keuangan yaitu *adequate*, *fair* dan *full disclosure*. Konsep yang paling sering dipraktekkan adalah *adequate disclosure* (pengungkapan yang cukup) yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku dimana pada tingkat ini investor dapat menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan. Konsep *fair disclosure* (pengungkapan wajar) mengandung sasaran etis dengan menyediakan informasi yang layak terhadap investor potensial, sedangkan *full disclosure* (pengungkapan penuh) merupakan pengungkapan atas semua informasi yang relevan. Terlalu banyak informasi akan membahayakan karena

penyajian rincian yang tidak penting justru akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan keuangan tersebut sulit dipahami. Oleh karena itu, Chariri dan Ghozali (2003) menyatakan bahwa pengungkapan yang tepat mengenai informasi yang penting bagi para investor dan pihak lainnya hendaknya bersifat cukup, wajar, dan lengkap.

Ada dua jenis pengungkapan, yang pertama adalah pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku dalam hal ini peraturan yang mengatur pengungkapan wajib laporan keuangan dikeluarkan oleh pemerintah melalui keputusan Bapepam. Kedua pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yaitu pengungkapan yang merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi yang dipandang relevan oleh pemakai laporan keuangan.

Salah satu isu penting dalam pasar modal adalah mengenai pengungkapan laporan keuangan. Pengungkapan ini penting karena laporan keuangan merupakan salah satu sumber utama informasi keuangan yang sangat penting bagi sejumlah pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi terutama pemegang saham dan investor untuk menentukan tujuan investasi mereka (Belkauoi, 2000). Beberapa kasus yang terjadi, semakin menunjukkan bahwa pentingnya pengungkapan informasi bagi *stakeholder*. Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu dari PT Petromine Energy Trading (anak perusahaan PT Bakrie & Brothers, Tbk) yang dalam Laporan Keuangan Tahunan (LKT) AKR Corporindo (AKRA) tercantum transaksi dari Petromine berupa pembelian bahan bakar senilai Rp 1,37 triliun. Transaksi tercatat dalam neraca pendapatan AKRA

namun pada LKT konsolidasi BNBR, dalam neraca beban pokok pendapatan tidak tercantum transaksi ini dengan jumlah beban tersebut mencapai Rp 8,6 triliun. Menurut PSAK yang berlaku, segala, segala transaksi yang bernilai lebih dari sama dengan 10% dari pendapatan emiten dicatat dalam neraca keuangan dengan beban pokok pendapatan Rp 8,6 triliun, maka nilai transaksi Rp 1,37 triliun adalah 15,39%, untuk itu wajib dicatatkan (www.detik.com). Kasus yang terjadi terhadap PT. Petromine Energy Trading yang merupakan anak dari perusahaan PT Bakrie & Brother Tbk, menunjukkan pentingnya pengungkapan wajib laporan keuangan.

Keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan dapat dilihat melalui kondisi keuangan perusahaan dengan informasi memadai yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Pengungkapan wajib yang akan dibahas pada penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur. Penelitian mengenai pengungkapan wajib laporan tahunan serta faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Faktor-faktor tersebut meliputi: struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional, *leverage* dan *Corporate Governance Perception Index*.

Salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengatasi konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial sehingga dapat mensejajarkan kepentingan pemilik dengan manajer. Semakin besar kepemilikan manajerial maka *agency cost* akan semakin turun. Hal ini dikarenakan semakin besar kepemilikan saham oleh manajerial, maka semakin besar informasi dimiliki oleh manajemen sekaligus sebagai pemilik perusahaan, sehingga hal tersebut mengakibatkan biaya agen yang digunakan untuk biaya monitoring semakin kecil, karena pemilik sudah merangkap sebagai manajemen. Penelitian sebelumnya

menemukan bahwa peningkatan atas kepemilikan manajemen akan mereduksi masalah agensi dan meningkatkan insentif manajer agar melakukan pengungkapan yang lebih luas.

Kepemilikan institusional berbeda dengan investor individual yang tidak begitu mencampuri urusan internal perusahaan yang mempunyai saham. Kepemilikan institusional akan mencoba untuk mempengaruhi manajemen perusahaan dalam mengelola urusan internal perusahaan dikarenakan kepemilikan institusional mempunyai kepemilikan yang agak besar dalam perusahaan. Mereka takut apabila manajemen perusahaan tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik maka akan berakibat buruk pada saham dimana terdapat investasi mereka yang besar. Apabila institusi mempunyai presentase kepemilikan saham yang besar, mereka pasti akan lebih intensif dalam mempengaruhi manajemen internal perusahaan dikarenakan mereka mempunyai kepemilikan yang lebih besar (Graves dan Waddock, 1990 dalam Hastuti, 2005).

Rasio *leverage* merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu hutang (Prastowo dan Juliaty, 2008). Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal yang seperti itu lebih tinggi (Jensen dan Meckling, 1976) dalam (Marwata, 2001).

Beberapa penelitian mengenai kelengkapan pengungkapan laporan keuangan yaitu; Penelitian Almalia dan Setiady (2006) yang menemukan bukti

bahwa menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif tidak signifikan, likuiditas dan profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan, umur berpengaruh negatif signifikan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian Kartika dan Hersugondo (2009) yang menemukan bukti bahwa *leverage* dan umur berpengaruh positif tidak signifikan, likuiditas berpengaruh negatif signifikan, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian Widati dan Wigati (2011) menemukan bukti bahwa *leverage* dan likuiditas berpengaruh negatif signifikan, profitabilitas berpengaruh positif signifikan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian Rofika dan Apsari (2011) menemukan bukti bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan, likuiditas dan profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian Wardani (2012) menemukan bukti bahwa *leverage* dan likuiditas berpengaruh negatif tidak signifikan, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan, umur berpengaruh negatif signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian Devi dan Suardana (2014) menemukan bukti bahwa *leverage* berpengaruh negatif, likuiditas berpengaruh negatif tidak signifikan dan ukuran

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian Halim dan Sampurno (2015) menemukan bukti bahwa *leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan, likuiditas dan umur perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian Maharani dan Budiasih (2016) menemukan bukti bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan, dan umur perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Berdasarkan pada keragaman hasil penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional, *leverage* dan *corporate governance perception index* terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, maka dalam hal ini penulis sangat terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Struktur Kepemilikan Institusional, *Leverage* dan *Corporate Governance Perception Index* terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Publik Yang Mengikuti Program *Corporate Governance Perception Index* Periode Tahun 2012-2016”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tingkat proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan Publik yang Mengikuti Program *Corporate Governance Perception Index* Periode Tahun 2012-2016?
2. Apakah tingkat proporsi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan Publik yang Mengikuti Program *Corporate Governance Perception Index* Periode Tahun 2012-2016?
3. Apakah tingkat proporsi *leverage* berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan Publik yang Mengikuti Program *Corporate Governance Perception Index* Periode Tahun 2012-2016?
4. Apakah tingkat proporsi *Corporate Governance Perception Index* berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan Publik yang Mengikuti Program *Corporate Governance Perception Index* Periode Tahun 2012-2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan Publik yang Mengikuti Program *Corporate Governance Perception Index* Periode Tahun 2012-2016.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan Publik yang Mengikuti Program *Corporate Governance Perception Index* Periode Tahun 2012-2016.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan Publik yang Mengikuti Program *Corporate Governance Perception Index* Periode Tahun 2012-2016.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Corporate Governance Perception Index* terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan Publik yang Mengikuti Program *Corporate Governance Perception Index* Periode Tahun 2012-2016.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media untuk belajar memecahkan permasalahan secara ilmiah dan penerapan ilmu serta teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Selain itu penelitian ini ditujukan sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan akuntansi yang ditempuh. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang akuntansi, dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, antara lain:

1. Investor

Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan tentang luas pengungkapan (*disclosure*) laporan keuangan sebuah perusahaan, dimana perusahaan yang kualitas pelaporan keuangannya sudah sesuai dengan PSAK yang diterapkan oleh SK Bapepam sehingga akan dapat lebih mudah mengetahui kondisi sebuah perusahaan dan juga sebagai bahan masukan kaitannya dalam pertimbangan pengambilan keputusan investasi dan sebagai bahan evaluasi dalam menilai kinerja emitennya

2. Manajemen Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dalam menyusun atau menyajikan laporan keuangan yang diwajibkan sesuai PSAK dan diharapkan oleh SK BAPEPAM, sehingga secara langsung manajemen perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam pelaporan keuangan pada sebuah perusahaan.

3. Akademisi

Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau menambah perbendaharaan bagi penelitian selanjutnya dan perpustakaan, khususnya yang berhubungan dengan luas pengungkapan (*disclosure*) laporan keuangan serta dapat menambah wawasan dalam hal pengetahuan tentang pengungkapan (*disclosure*) laporan keuangan.